



**DISKAN  
KOTA DUMAI**





**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif


**# bangga  
melayani  
bangsa**

# DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI 2025-2029 Rencana Strategis (RENSTRA)



 [diskan.dumaikota.go.id](http://diskan.dumaikota.go.id)

 0765-4300498

 [dinasperikanan.kotadumai](https://www.instagram.com/dinasperikanan.kotadumai)

JL. Dermaga No.08 Purnama, Dumai



## **WALIKOTA DUMAI**

**WALI KOTA KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 56 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029**

**WALI KOTA DUMAI,**

- Menimbang** : a. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 8 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DUMAI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### PASAL 1

Dalam Peraturan Wali Kota Dumai ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029.

6. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029**

**Pasal 2**

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

**BAB III**  
**SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

**Pasal 3**

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
  - e. BAB V : PENUTUP;

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 18 September 2025



Diundangkan di Dumai  
Pada tanggal 18 September 2025



PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 33 SERI 0

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025-2029 ini dapat disusun, yang merupakan dokumen perencanaan dalam rangka tugas pokok institusi sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan sistematika sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Semua program dan kegiatan yang tersusun di dalam Perubahan Rencana Strategis ini sedapat mungkin telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis disusun sebagai pedoman dalam rangka mencapai Visi dan Misi SKPD, perumusan program dan kegiatan (strategis, prioritas dan arah kebijakan) selama periode 5 (lima) tahun, selanjutnya Perubahan Renstra menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan yang dievaluasi melalui Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP).

Disadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen ini, untuk itu saran-saran penyempurnaan sangat diharapkan. Dokumen ini di buat untuk dapat di jadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi penerima mandat, dimana proses penyusunannya telah diupayakan memenuhi sistem dan mekanisme sebagaimana ditetapkan.

Dumai, 19 September 2025

KEPALA,  


**H. ARIACAN, S.H., M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19720412 200112 1 003

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN</b> .....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.1.1 Sekretariat .....	9
2.1.2 Bidang Pembudidayaan Ikan.....	12
2.1.3 Bidang Kenelayanan.....	14
2.1.4 Unit Pelaksana Teknis (UPT).....	15
2.1.4.1 UPT Benih Ikan Air Tawar (BIAT) Kelas A .....	16
2.1.4.2 UPT Budidaya Air Payau (BAP) Kelas A .....	17
2.1.5 Kelompok Jabatan Fungsional .....	18
2.1.6 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	18
2.1.6.1 Sumber Daya Aparatur Dinas Perikanan Kota Dumai .....	18
2.1.6.2 Sarana dan Prasarana Kerja.....	21
2.1.7 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
2.1.8 Kelompok Sasaran Layanan .....	40
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	40
2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	41
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah .....	43
2.2.3 Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	44
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> ....	49
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....	49
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	52
3.2.1 Strategi Dinas Perikanan Kota Dumai .....	52
3.2.2 Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kota Dumai .....	55
3.2.3 Program Prioritas Perangkat Daerah .....	57
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	59

4.1	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Sesuai dengan Bidang Urusan .....	59
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	80
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		87

**LAMPIRAN**

Cascading Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025-2029

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kota Dumai .....	11
3.1 Diagram Analisis SWOT Perumusan Strategi Jangka Menengah	53
4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah .....	59

## DAFTAR GRAFIK

	<b>Halaman</b>
2.1 Data Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024 .....	29
2.2 Data Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024 .....	34

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
2.1 PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025 .....	18
2.2 PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2005	18
2.3 PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2025 .....	19
2.4 Personalia Dinas Perikanan Kota Dumai yang Menduduki Jabatan Struktural .....	19
2.5 Susunan Personalia Kelompok Jabatan Fungsional .....	20
2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2020-2024 .....	22
2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2024 .....	23
2.8 Data Produksi Perikanan Budidaya Kota Dumai Tahun 2020-2024 .....	30
2.9 Capaian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024 .....	32
2.10 Target Capaian Angka Konsumsi Ikan Kota Dumai Tahun 2017-2023 dan Perbandingan dengan Provinsi dan Nasional .....	40
2.11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perikanan Berdasarkan Ranwal RPJMD Kota Dumai 2025-2029 .....	42
2.12 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	42
2.13 Penetapan Isu-isu Strategis Dinas Perikanan .....	44
2.14 Kaitan Misi, Tujuan, Sasaran Kota Dumai dengan Peran Dinas Perikanan Kota Dumai.....	47
3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....	50
3.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Perikanan Kota Dumai.....	53
3.3 Keterkaitan Strategi RPJMD 2025-2029 dengan Strategi Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025-2029 .....	54
3.4 Penahapan Renstra Dinas Perikanan .....	54

3.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	55
3.6	Keterkaitan Arah Kebijakan RPJMD dengan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	56
3.7	Program Prioritas Walikota Dumai yang Menjadi Kewenangna Perangkat Daerah .....	58
4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai .....	61
4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan Kota Dumai .....	67
4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	79
4.4	Proyeksi Angka Konsumsi Ikan Kota Dumai sebelum Perubahan dan Setelah Perubahan Menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat .....	83
4.5	Data Baseline Konsumsi Ikan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2019-2024.....	83
4.6	Target Capaian Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025-2029	85
4.7	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perikanan Kota Dumai.....	86
4.8	Rumus Indikator Kinerja Kunci Dinas Perikanan Kota Dumai...	86

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, mengorganisasir secara sistematis usaha-usaha dalam melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap perangkat daerah harus menyusun rencana strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026. Rencana Strategis sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, menjelaskan rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tuntutan masyarakat yang semakin berkembang, menjadikan pemerintah sebagai penerima amanah ataupun mandat perlu mengantisipasinya sejak awal dengan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berazaskan kepada pelayanan masyarakat yang prima. Hal tersebut dilaksanakan melalui berbagai tahap yaitu dengan mengukur perencanaan secara optimal yang disertai dengan pemantauan, pengendalian serta evaluasi secara efektif dan efisien. Guna keperluan ini dibutuhkan suatu Perencanaan Strategik sebagai instrumen mencapai apa yang telah digariskan.

Rencana strategis berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Rencana strategis juga dapat mengawal kebijakan mensejahterakan masyarakat dapat dilaksanakan secara berurutan dan bersinergi dengan perangkat daerah lain yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Rencana strategis perangkat daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal rencana strategis perangkat daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana strategis perangkat daerah.

Hubungan rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan secara vertikal rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai disusun berpedoman pada RPJMD Kota Dumai, RPJM bidang Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kemudian secara horizontal rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai berperan sangat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan perangkat daerah.

Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan perangkat daerah Kota Dumai yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 27 Agustus 2024, maka Dinas Perikanan Kota Dumai melakukan

perubahan rencana strategis terhadap kinerja, indikator dan satuan target sub kegiatan dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025-2029

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 8 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri D).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan yang menggambarkan visi, misi, strategi atau arah kebijakan serta program dan kegiatan strategis yang akan dicapai. Adapun maksud penyusunan rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai 5 (lima) tahun.
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan perangkat daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja 5 (lima) tahun lalu menjadi rencana strategis perangkat daerah.

3. Meningkatkan komunikasi baik vertical maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi yang diinginkan.
4. Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat karena pola pelayanan yang diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan Kota Dumai dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2025-2029.
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai untuk periode tahun 2025-2029.
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi pemerintah Kota.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Perikanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan rencana strategis perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

## **Bab I Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra perangkat daerah, fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra perangkat daerah, keterkaitan Renstra. perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra Kementrian/Lembaga, dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja perangkat daerah.

### **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra perangkat daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Memuat tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan kelompok sasaran layanan

### **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis perangkat daerah

## **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2 Strategi, Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

#### **Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini memuat uraian program; uraian kegiatan; uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama perangkat daerah; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

#### **Bab V Penutup**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Perikanan Kota Dumai mengemban amanah dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat perikanan. Untuk itu disusunlah tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai.

Dinas Perikanan Kota Dumai mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perikanan. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas perikanan menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perikanan
3. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Dinas Perikanan terdiri dari: (1) Kepala Dinas, (2) Sekretariat, terdiri dari subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional, (3) Bidang Pembudidayaan Ikan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional, (4) Bidang Kenelayanan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional, dan (5) UPT. Adapun bagan susunan organisasi dinas, dapat dilihat pada Gambar 2.1. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional.

##### **2.1.1 SEKRETARIAT**

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana,

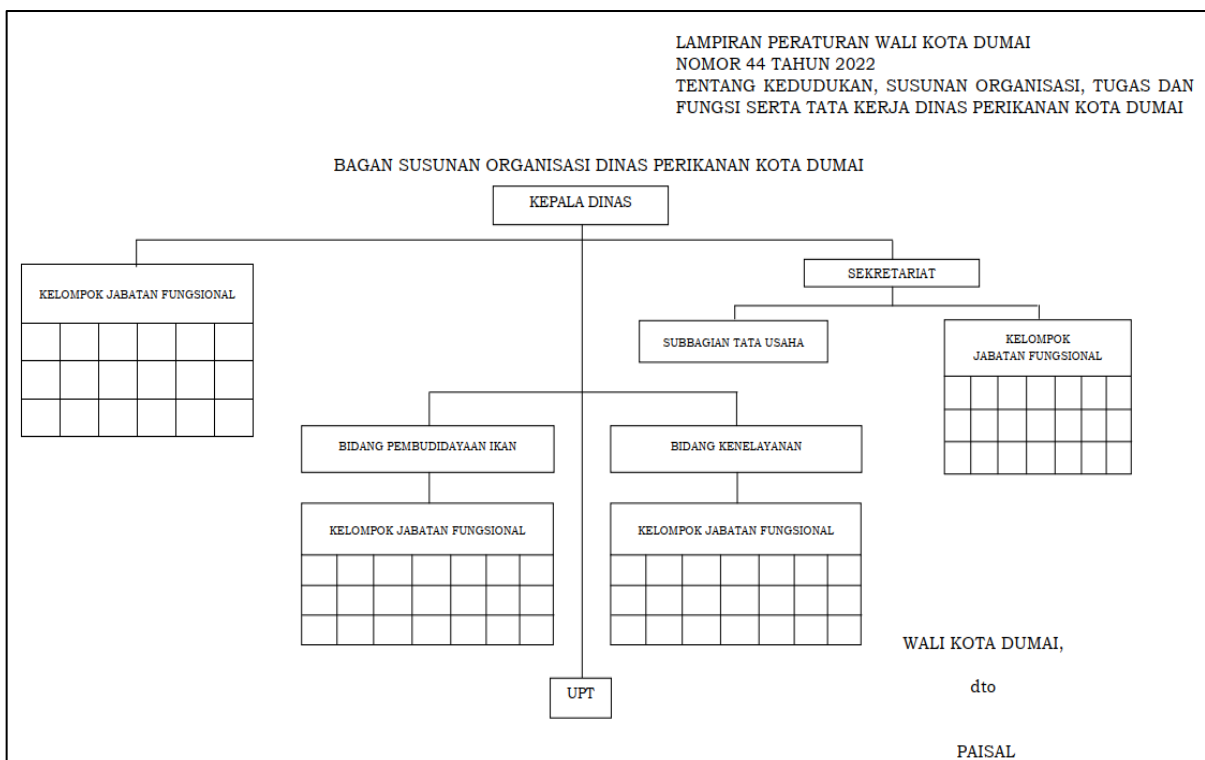
koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris membawahi subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Adapun uraian tugas sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategis organisasi.
2. Pelaksanaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, arsip, kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan dan asset dinas.
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi/Lembaga lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
5. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja pemerintah daerah, perjanjian kinerja, rencana program dan kegiatan serta penganggaran Dinas.
2. Penyelenggaraan urusan administrasi yang meliputi ketatausahaan, arsip, kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan dan aset dinas.
3. Penataan organisasi dan tata laksana.
4. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
5. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan dinas.
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
7. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas.
8. Pengkoordinasian pengumpulan dan pengolahan data di lingkungan Dinas.
9. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur.

10. Pengkoordinasian persiapan bahan untuk rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis.
11. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan dinas; dan
13. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.



**Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kota Dumai**  
**Sumber: Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 44 Tahun 2022**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi. Adapun uraian tugas subbagian tata usaha adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan penyusunan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian tata usaha.
2. Penyelenggaraan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas.
3. Pelaksanaan fasilitasi administrasi kepegawaian.
4. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
5. Penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas.

6. Pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tata usaha dan kepegawaian.
7. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional.
8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
9. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol.
10. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
11. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **2.1.2 BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN**

Sebagai perangkat daerah dengan tipe C, Dinas Perikanan didukung oleh 2 (dua) bidang dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang perikanan, yaitu bidang pembudidayaan ikan dan bidang kenelayanan. Bidang Pembudidayaan Ikan dan bidang Kenelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang pembudidayaan ikan mempunyai tugas pelaksanaan perumusan dan kebijakan, pelayanan, pembinaan, standarisasi teknis dan pengembangan usaha dibidang pembudidayaan ikan. Adapun uraian tugas bidang pembudidayaan ikan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pembudidayaan ikan
2. Melakukan analisis perumusan pengembangan kegiatan di bidang pembudidayaan ikan
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kirteria perikanan budidaya
4. Melakukan koordinasi, rekomendasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepala kepala Dinas Perikanan; dan

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pembudidayaan ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. menyiapkan perumusan kebijakan serta merencanakan program/kegiatan dan penganggaran
2. Memfasilitasi penumbuhan/pembentukan dan melaksanakan pembinaan serta pendampingan kelompok pembudidaya ikan
3. Memfasilitasi penerbitan perizinan perikanan budidaya
4. Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data dan informasi
5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan teknologi dan informasi perikanan budidaya
6. Memfasilitasi kemitraan dengan pihak atau lembaga lainnya untuk pengembangan usaha budidaya perikanan
7. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
8. Melaksanakan survey, pendataan dan inventarisasi kawasan potensi serta menyusun rencana perluasan dan revitalisasi kawasan budidaya perikanan darat, payau dan laut
9. Melaksanakan penerapan teknologi usaha budidaya perikanan
10. Melaksanakan pengujian kualitas air di lingkungan budidaya perikanan secara berkala
11. Melaksanakan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan organisme pengganggu, hama dan penyakit ikan
12. Melaksanakan pemantauan obat ikan, kimia dan bahan biologi (oikb) yang beredar
13. Memfasilitasi proses standarisasi dan sertifikasi usaha budidaya
14. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian residu dan bahan pencemar lainnya
15. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan perikanan budidaya
16. Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang pembudidayaan ikan; dan

17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dan tugas fungsinya.

### **2.1.3 BIDANG KENELAYANAN**

Bidang Kenelayanan mempunyai tugas pelaksanaan perumusan dan kebijakan, pelayanan, pembinaan, standarisasi teknis dan pengembangan usaha di bidang kenelayanan. Uraian tugas bidang kenelayanan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan rencana kebijakan dibidang kenelayanan
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kenelayanan dalam pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha dan kemitraan, dan pembinaan kelembagaan
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, petunjuk teknis dan kriteria dibidang kenelayanan meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha dan kemitraan, dan pembinaan kelembagaan
4. Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kenelayanan meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha dan kemitraan, dan pembinaan kelembagaan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugasnyanya, bidang kenelayanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyiapkan perumusan kebijakan serta merencanakan program/kegiatan dan penganggaran
2. Melakukan analisa peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan bidang kenelayanan
3. Memfasilitasi penumbuhan/pembentukan dan melaksanakan pembinaan serta pendampingan kelompok nelayan dan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan

4. Melakukan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pendampingan kepada kelompok nelayan dan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan
5. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data jumlah ikan keluar masuk antar wilayah, data konsumsi ikan, data usaha dan investasi pada kegiatan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
6. Memfasilitasi kemitraan sarana produksi antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan swasta
7. Memfasilitasi kemitraan permodalan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan perbankan dan non perbankan
8. Melakukan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, pembinaan kelayakan dasar di unit pengolahan ikan skala kecil dan menengah
9. Menganalisis kebutuhan perlindungan keselamatan nelayan
10. Menganalisis diversifikasi usaha keluarga nelayan
11. Melakukan pembinaan dan pendampingan izin usaha perikanan
12. Melaksanakan identifikasi pada perairan umum dalam pengelolaan sumberdaya perairan
13. Mengumpulkan data dan informasi tentang izin usaha perikanan
14. Melakukan pengawasan usaha perikanan
15. Melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang kenelayanan
16. Melakukan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang kenelayanan; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dan tugas fungsinya.

#### **2.1.4 UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)**

Unit Pelaksana Teknis atau UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Ada 2 (dua) UPT dibawah Dinas Perikanan, yaitu UPT Benih Ikan Air Tawar Kelas A dan UPT Budidaya Air Payau Kelas A. Kepala UPT bertugas melaksanakan

kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan melaksanakan kegiatan teknis penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

#### **2.1.4.1 UPT BENIH IKAN AIR TAWAR (BIAT) KELAS A**

UPT BIAT Kelas A melaksanakan tugas kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam penyediaan benih yang bermutu, berkualitas dan terspesifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BIAT Kelas A menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yaitu:

- a. Melakukan penghimpunan data yang berkaitan dengan UPT Benih Ikan Air Tawar Kelas A;
- b. Melaksanakan pembenihan ikan air tawar, uji coba pembenihan ikan air tawar dan uji coba pembesaran budidaya ikan air tawar;
- c. Pelaksanaan penerapan teknologi baru;
- d. Penyedia benih ikan air tawar yang berkualitas;
- e. Perencanaan kebutuhan induk dan peralatan pendukung lainnya untuk kegiatan perbenihan;
- f. Melaksanakan bimbingan langsung terhadap Unit Pembenihan Rakyat di daerah kerjanya dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik pembenihan;
- g. Membantu pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada Unit Pembenihan Rakyat;
- h. Menghasilkan benih ikan untuk keperluan pembudidaya, penyuluhan dan mengisi kekurangan benih yang dihasilkan di Kota Dumai;
- i. Melayani aktivitas magang, pelatihan serta penelitian bagi pembudidaya ikan dan akademisi;
- j. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Benih Ikan Air Tawar Kelas A;
- k. Pelaksanaan koordinasi pengembangan benih ikan air tawar, pakan serta sarana dan prasarana UPT Benih Ikan Air Tawar Kelas A dengan sub unit kerja lainnya;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **2.1.4.2 UPT BUDIDAYA AIR PAYAU (BAP) KELAS A**

UPT BAP Kelas A melaksanakan tugas teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perikanan, meliputi kegiatan yang menghasilkan produk yang bermutu, berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu meningkatkan produksi budidaya air payau. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BAP Kelas A menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan penghimpunan data yang berkaitan dengan UPT Budidaya Air Payau Kelas A;
- b. Pelaksanaan kegiatan budidaya air payau;
- c. Pelaksanaan penerapan teknologi yang tepat guna untuk kegiatan budidaya air payau di UPT Budidaya Air Payau Kelas A;
- d. Pelaksana penerapan teknologi baru sebagai bentuk inovasi budidaya air payau di UPT Budidaya Air Payau Kelas A;
- e. Melayani aktivitas magang, pelatihan serta penelitian bagi pembudidaya ikan dan akademisi;
- f. Perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan terkait sarana prasarana produksi budidaya air payau di UPT Budidaya Air Payau Kelas A;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi budidaya air payau di UPT Budidaya Air Payau Kelas A;
- h. Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi serta kegiatan kerjasama dengan pihak sub unit kerja lainnya di lingkungan Dinas, Pemerintah maupun non pemerintah dan swasta dalam rangka mengoptimisasi, pemanfaatan lahan dan sarana prasarana lainnya guna meningkatkan produksi budidaya air payau;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya, yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## 2.1.5 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan fungsional pada lingkungan Dinas Perikanan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

## 2.1.6 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.1.6.1 SUMBER DAYA APARATUR DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perikanan Kota Dumai didukung dengan 37 Orang Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari golongan IV, golongan III, golongan II, serta PPPK dengan Golongan IX, VII, V dan I dengan perincian sebagai berikut (Tabel 1).

**Tabel 2.1 PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025**

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Golongan IV	2	5,41
2	Golongan III	16	43,24
3	Golongan II	1	2,70
4	Golongan IX	11	29,73
5	Golongan VII	3	8,11
6	Golongan V	3	8,11
7	Golongan I	1	2,70
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2025)

Berdasarkan Tabel di atas, Dinas Perikanan di dominasi oleh golongan III sejumlah 16 orang dan diikuti dengan PPPK Golongan IX sebanyak 11 orang. Berdasarkan jabatan dan eselon, Dinas Perikanan Kota Dumai terbagi menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu eselon II, eselon III, Eselon IV, Perjabat Fungsional, dan staf. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2 PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2025**

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Eselon II	1	2,70

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Persentase (%)
2	Eselon III	3	8,11
3	Eselon IV	5	13,51
4	Pejabat Fungsional	4	10,81
5	Staf/Non Struktural	24	64,86
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2025)

Tingkatan pendidikan pegawai juga dilihat pada gambaran umum organisasi. Walaupun tingkat pendidikan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja Dinas Perikanan, namun hal tersebut menjadi syarat dasar ketetapan penerimaan PNS. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3 PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2025**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Strata II (S-2)	4	10,81
2	Strata I (S-1)	25	67,57
3	Diploma III	3	8,11
3	SLTA Sederajat	4	10,81
4	SD Sederajat	1	2,70
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2025)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 44 tahun 2022, susunan organisasi perangkat daerah Dinas Perikanan Kota Dumai terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional. Personalia yang telah menduduki jabatan struktural sesuai dengan struktur organisasi perangkat daerah telah ditetapkan sejumlah 9 orang terdiri dari eselon II sejumlah 1 orang, eselon III sejumlah 3 orang dan eselon IV sejumlah 5 orang. Uraian personalia tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4 Personalia Dinas Perikanan Kota Dumai yang Menduduki Jabatan Struktural**

No	Jabatan	Nama Pejabat/NIP/Pangkat	Eselon
1.	Kepala Dinas	H. Afrilagan, S.H, M.Si NIP. 19720412 200112 1 003 Pembina Tk. I, (IV/b)	II

No	Jabatan	Nama Pejabat/NIP/Pangkat	Eselon
2.	Sekretaris	Isroyanti, S.Pi, M.Si NIP. 19760726 200212 2 014 Pembina Tk. I, (IV/b)	III/a
3.	Kepala Bidang Kenelayanan	Surya, S.Pi NIP. 19760526 200312 1 003 Penata Tk. I, (III/d)	III/b
4.	Kepala Bidang Pembudidaya ikan	Sri Gustiana Candra, S.Pi, M.Sc. NIP. 19750815 201001 2 012 Penata, (III/c)	III/b
5.	Kasubbag Tata Usaha	Ena Noviza, S.Sos NIP.19840913 200801 2 008 Penata (III/d)	IV/a
6.	Ka. UPT Benih Ikan Air Tawar	Refli Akmal, S.Sos NIP. 19710527 200604 1 002 Penata Muda Tk. I, (III/b)	IV/a
7.	Ka Subbag. Tata Usaha UPT Benih Ikan Air Tawar	Siti Masitah, S.Pi NIP. 19900509 201503 2 005 Penata, (III/c)	IV/b
8.	Ka. UPT Budidaya Air Payau	Teguh Wiyono, S.St.Pi NIP. 19720416 200003 1 002 Penata, (III/d)	IV/a
9.	Ka Subbag Tata Usaha UPT Budidaya Air Payau	Mohammad Faathir Ahadi, S.Pi NIP. 19861207 201503 1 005 Penata, (III/c)	IV/b

Sumber Data: Bagian Tata Usaha Dinas Perikanan Kota Dumai (2025)

Selain jabatan struktural, juga terdapat kelompok jabatan fungsional yang kedudukannya langsung berada di bawah Kepala Dinas Perikanan Kota Dumai. Ada 6 (enam) orang yang menduduki kelompok jabatan fungsional di Dinas Perikanan. Adapun susunan personalia kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.5 Susunan Personalia Kelompok Jabatan Fungsional**

No	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan
1	Soetjie Poernama Sari, S.IK, MM NIP. 19870322 201503 2 002 Penata, III/c	Perencana Ahli Muda Hasil Penyetaraan
2	Maizul, S.Pi NIP. 19671219 200112 1 002 Penata Tk. I, III/d	Penyuluh Perikanan Ahli Muda Hasil Penyetaraan
3	Nazifah, S.Pi NIP. 19701125 200003 2 003 Penata Tk. I, III/d	
4	Neldi, S.Pi NIP. 19750129 200212 1 003 Penata Tk. I, III/d	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda Hasil Penyetaraan

Sumber: Bagian Tata Usaha Dinas Perikanan Kota Dumai (2025)

### **2.1.6.2 SARANA DAN PRASARANA KERJA**

Sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas di Dinas Perikanan Kota Dumai. Adapun sarana dan prasarana tersebut meliputi bangunan Gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain sebagainya.

Secara umum, Dinas Perikanan Kota Dumai telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang belum memadai. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat dalam buku inventaris

### **2.1.7 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Gambaran kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai 5 (lima) tahun terakhir mengacu kepada sasaran strategis Dinas Perikanan Kota Dumai yang telah ditentukan dalam Renstra sebelumnya. Kegiatan utama usaha sektor perikanan di Kota Dumai adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi dalam penyediaan dan keragaman bahan pangan dari protein hewani. Namun hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan usaha penangkaran, budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Dalam penyelenggaraan urusan perikanan selama lima tahun terakhir, terdapat 1 (satu) sasaran strategis Dinas Perikanan Kota Dumai, yaitu Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya dengan indikator kinerja utama, meliputi:

1. Produksi perikanan budidaya;
2. Produksi perikanan ikan;
3. Cakupan bina kelompok budidaya;
4. Cakupan bina kelompok nelayan; dan
5. Angka konsumsi ikan.

**Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Kinerja Tahun ke (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Perikanan Budidaya (ton)				273,1	292,18	288	308	330	284,9	311,8	382,69	344,07	292,44	104,32%	106,72%	132,88%	111,71%	88,62%
2	Produksi Perikanan Tangkap (ton)				318,8	334,77	706	742	1118	585,8	710,6	1020,3	1057,43	1280,27	183,75%	212,27%	144,52%	142,51%	114,51%
3	Cakupan Bina Kelompok Budidaya (kelompok)				34	40	31	34	37	34	37	31	34	44	100,00%	92,50%	100,00%	100,00%	118,92%
4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (kelompok)				37	37	18	20	22	29	32	18	23	25	78,38%	86,49%	100,00%	115,00%	113,64%
5	Angka Konsumsi Ikan (kg/Kap/Tahun)				31	31	42	42	50,6	44,75	45,19	49,64	44,83	44,83	144,35%	145,77%	118,19%	106,74%	88,60%

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

**Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2024**

Uraian	Indikator	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan</b>	5.558.092.859	5.279.932.245	6.024.608.581	4.726.804.470	4.945.352.155	4.927.587.824	5.769.386.784	4.031.897.277	88,98	93,33	95,76	85,30		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	56.995.000	45.600.000	76.919.000	75.467.992	56.972.500	45.560.000	76.894.600	73.320.000	99,96	99,91	99,97	97,15		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.995.000	45.600.000	76.919.000	75.467.992	56.972.500	45.560.000	76.894.600	73.320.000	99,96	99,91	99,97	97,15		
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen / Laporan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	3.785.899.611	3.268.602.255	3.084.263.500	2.719.611.300	3.196.410.551	2.981.146.860	2.866.798.145	2.590.375.304	84,43	91,21	92,95	95,25		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3.785.899.611	3.268.602.255	3.084.263.500	2.719.611.300	3.196.410.551	2.981.146.860	2.866.798.145	2.590.375.304	84,43	91,21	92,95	95,25		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uraian	Indikator	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Triwulan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi														
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>97.113.347</b>	<b>34.000.000</b>	<b>43.298.000</b>	<b>51.504.000</b>	<b>96.649.000</b>	<b>33.950.000</b>	<b>43.298.000</b>	<b>35.490.000</b>	99,52	99,85	100,00	68,91		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	97.113.347	34.000.000	43.298.000	51.504.000	96.649.000	33.950.000	43.298.000	35.490.000	99,52	99,85	100,00	68,91		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.796.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.253.000</b>	0,00	0,00	0,00	42,23		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	59.796.000	-	-	-	25.253.000	0,00	0,00	0,00	42,23		
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>300.191.207</b>	<b>400.900.000</b>	<b>505.046.800</b>	<b>550.550.100</b>	<b>299.368.000</b>	<b>396.268.818</b>	<b>501.020.906</b>	<b>276.891.677</b>	99,73	98,84	99,20	50,29		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.669.605	5.500.000	10.083.700	7.500.000	5.668.000	5.500.000	10.083.700	3.975.700	99,97	100,00	100,00	53,01		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	83.997.130	166.000.000	168.978.100	286.270.400	83.996.000	161.468.400	165.866.745	130.747.172	100,00	97,27	98,16	45,67		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.992.000	14.500.000	18.590.000	20.000.000	12.992.000	14.500.000	18.580.000	11.825.000	100,00	100,00	99,95	59,13		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	19.597.447	10.500.000	20.985.000	18.949.300	18.777.000	10.478.000	20.344.010	4.098.700	95,81	99,79	96,95	21,63		

Uraian	Indikator	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.643.025	4.400.000	6.720.000	4.650.000	7.643.000	4.400.000	6.585.000	3.400.000	100,00	100,00	97,99	73,12		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.292.000	200.000.000	279.690.000	213.180.400	170.292.000	199.922.418	279.561.451	122.845.105	100,00	99,96	99,95	57,62		
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	<b>67.000.000</b>	<b>501.108.206</b>	<b>254.837.978</b>	-	<b>50.370.000</b>	<b>497.521.936</b>	<b>177.086.000</b>	0,00	75,18	99,28	69,49		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	125.208.000	120.750.000	-	-	125.160.000	43.900.000	0,00	0,00	99,96	36,36		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	67.000.000	151.194.000	-	-	50.370.000	148.180.000	-	0,00	75,18	98,01	0,00		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	99.455.378	-	-	-	98.650.000	0,00	0,00	0,00	99,19		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	24.824.270	34.632.600	-	-	24.300.000	34.536.000	0,00	0,00	97,89	99,72		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	199.881.936	-	-	-	199.881.936	-	0,00	0,00	100,00	0,00		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.081.156.996</b>	<b>1.110.459.990</b>	<b>1.229.976.769</b>	<b>798.033.900</b>	<b>1.066.259.554</b>	<b>1.069.325.291</b>	<b>1.202.095.953</b>	<b>731.772.035</b>	98,62	96,30	97,73	91,70		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000	1.170.000	2.535.000	1.476.000	1.300.000	1.170.000	2.530.000	980.000	100,00	100,00	99,80	66,40		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	226.800.000	186.289.990	196.600.000	181.747.500	226.105.554	164.119.779	178.039.797	178.705.745	99,69	88,10	90,56	98,33		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	853.056.996	923.000.000	1.030.841.769	614.810.400	838.854.000	904.035.512	1.021.526.156	552.086.290	98,34	97,95	99,10	89,80		

Uraian	Indikator	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>236.736.698</b>	<b>353.370.000</b>	<b>583.996.306</b>	<b>217.003.200</b>	<b>229.692.550</b>	<b>350.966.855</b>	<b>581.757.244,07</b>	<b>121.709.261</b>	97,02	99,32	99,62	56,09		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	225.440.928	140.270.000	141.832.800	126.948.000	219.093.550	137.955.575	140.700.830	110.945.361	97,18	98,35	99,20	87,39		
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11.295.770	13.100.000	32.680.000	12.030.000	10.599.000	13.084.400	32.673.770	10.763.900	93,83	99,88	99,98	89,48		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	200.000.000	409.483.506	78.025.200	-	199.926.880	408.382.644,07	-	0,00	99,96	99,73	0,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Cakupan kelompok nelayan terbina</b>	<b>512.100.000</b>	<b>1.160.166.000</b>	<b>213.726.500</b>	<b>182.400.000</b>	<b>499.100.300</b>	<b>1.090.129.500</b>	<b>206.674.265</b>	<b>155.650.000</b>	97,46	93,96	96,70	85,33		
<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah perairan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya</b>	<b>450.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>437.000.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	97,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Penyediaan Data dan Informasi sumber daya ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	420.650.000	-	-	-	407.650.300	-	-	-	96,91	0,00	0,00	0,00		
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	29.350.000	-	-	-	29.350.000	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya</b>	<b>62.100.000</b>	<b>1.160.166.000</b>	<b>213.726.500</b>	<b>182.400.000</b>	<b>62.100.000</b>	<b>1.090.129.500</b>	<b>206.674.265</b>	<b>155.650.000</b>	100,00	93,96	96,70	85,33		
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	428.350.000	-	-	-	374.719.400	-	-	0,00	87,48	0,00	0,00		

Uraian	Indikator	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	62.100.000	31.900.000	213.726.500	182.400.000	62.100.000	31.900.000	206.674.265	155.650.000	100,00	100,00	96,70	85,33		
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	-	699.916.000	-	-	-	683.510.100	-	-	0,00	97,66	0,00	0,00		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Cakupan kelompok aktif budidaya terbina</b>	<b>1.159.600.400</b>	<b>1.361.990.000</b>	<b>1.743.552.298</b>	<b>2.774.961.630</b>	<b>1.112.371.519</b>	<b>1.343.828.176</b>	<b>1.703.809.368</b>	<b>2.228.710.025</b>	95,93	98,67	97,72	80,31		
<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya</b>	<b>62.332.250</b>	<b>500.500.000</b>	<b>690.953.879</b>	<b>889.096.450</b>	<b>62.331.350</b>	<b>500.500.000</b>	<b>674.796.250</b>	<b>842.106.350</b>	100,00	100,00	97,66	94,71		
Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-	-	690.953.879	784.838.050	-	-	674.796.250	784.735.550	0,00	0,00	97,66	99,99		
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	-	-	-	58.188.800	-	-	-	57.370.800	0,00	0,00	0,00	98,59		
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	-	500.500.000	-	-	-	500.500.000	-	-	0,00	100,00	0,00	0,00		
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	62.332.250	-	-	46.069.600	62.331.350	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah Dokumen/laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>1.097.268.150</b>	<b>861.490.000</b>	<b>1.052.598.419</b>	<b>1.885.865.180</b>	<b>1.050.040.169</b>	<b>843.328.176</b>	<b>1.029.013.117,5</b>	<b>1.386.603.675</b>	95,70	97,89	97,76	73,53		
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	848.958.050	798.000.000	526.531.300	820.913.400	846.886.199	780.125.000	509.990.162	652.340.507	99,76	97,76	96,86	79,47		
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan	180.800.000	-	-	-	138.769.650	-	-	-	76,75	0,00	0,00	0,00		

Uraian	Indikator	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	37.510.100	26.990.000	200.539.119	194.994.900	34.384.320	26.703.176	198.609.000	152.371.050	91,67	98,94	99,04	78,14		
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30.000.000	36.500.000	122.330.500	183.827.000	30.000.000	36.500.000	118.527.600	124.300.000	100,00	100,00	96,89	67,62		
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi		-	203.197.500	686.129.880	-	-	201.886.355,5	457.592.118	0,00	0,00	99,35	66,69		
<b>PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Persentase wilayah sampel aki</b>	<b>527.862.985</b>	<b>75.000.000</b>	<b>74.999.300</b>	<b>138.594.000</b>	<b>463.818.485</b>	<b>74.994.650</b>	<b>74.983.300</b>	<b>69.741.800</b>	87,87	99,99	99,98	50,32		
<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>527.862.985</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.497.200</b>	<b>463.818.485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.000.000</b>	87,87	0,00	0,00	89,37		
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	527.862.985	-	-	23.497.200	463.818.485	-	-	21.000.000	87,87	0,00	0,00	89,37		
<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah dokumen penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>-</b>	<b>75.000.000</b>	<b>74.999.300</b>	<b>115.096.800</b>	<b>-</b>	<b>74.994.650</b>	<b>74.983.300</b>	<b>48.741.800</b>	0,00	99,99	99,98	42,35		
Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	75.000.000	74.999.300	115.096.800	-	74.994.650	74.983.300	48.741.800	0,00	99,99	99,98	42,35		
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		

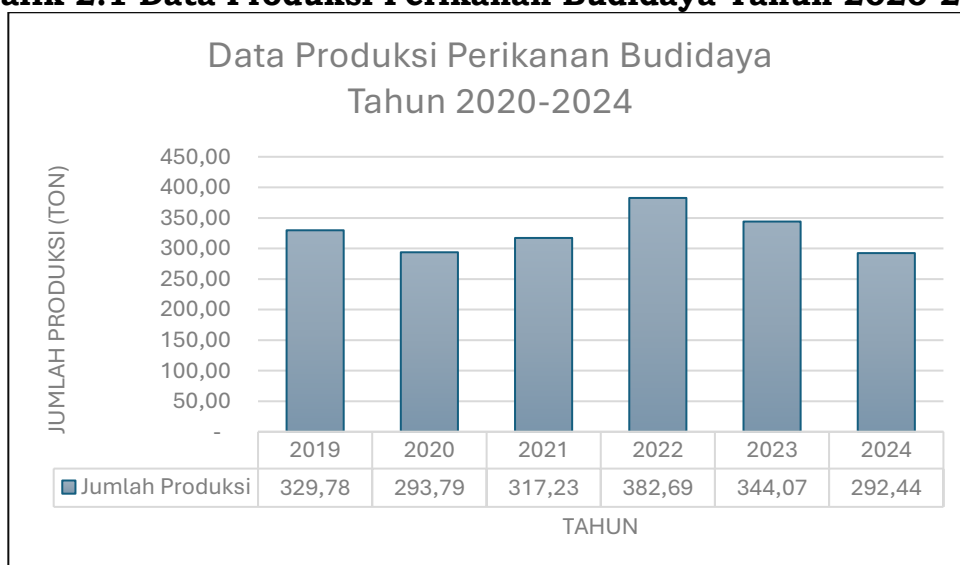
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

Berikut penjelasan berdasarkan Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2020-2024.

### 1. **Produksi Perikanan Budidaya**

Produksi perikanan budidaya merupakan pengumpulan data dari semua hasil pembudidayaan ikan yang dipelihara, dibesarkan, dan/atau dibiakkan serta dipanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan, yang sebagian besar untuk dijual, termasuk jumlah ikan yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau yang diberikan kepada pekerja sebagai upah. Satuan yang digunakan dalam bentuk ton.

**Grafik 2.1 Data Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024**



Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 adalah sebesar 292,44 ton dan jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yakni sebesar 330 ton, maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 88,62%. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 17,65% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2023 yakni sebesar 344,07 ton. Adapun data produksi perikanan budidaya selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Grafik 2.1.

Berdasarkan Grafik di atas, pencapaian data produksi perikanan budidaya tertinggi adalah pada tahun 2022 dengan total produksi sebesar 382,69 ton dan terendah pada tahun 2024 dengan total produksi sebesar 292,44 ton. Ada 7 (tujuh) komoditas, yang menyumbang hasil

produksi pada tahun 2022, yaitu Nila, Gurami, Lele, Patin, Bawal, Bandeng, dan Udang Vanname. Penurunan produksi pada tahun 2024 disebabkan karena tidak berkembangnya budidaya ikan pada kelompok binaan Dinas Perikanan Kota Dumai. Selain itu ada faktor penghambat lainnya yang menyebabkan produksi perikanan budidaya menurun pada tahun 2024, yaitu (1) adanya penurunan produksi dari komoditas gurami, lele dan udang; (2) pertumbuhan ikan yang melambat karena faktor kualitas air, benih yang digunakan dan pakan; (3) tingginya tingkat kematian ikan saat pemeliharaan; (4) adanya serangan penyakit; (5) fluktuasi harga pakan; (6) banyak pembudidaya ikan yang beralih profesi. Untuk melihat rincian produksi perjenis ikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.8 Data Produksi Perikanan Budidaya Kota Dumai Tahun 2020-2024**

No	Jenis Ikan	Produksi (Kg)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nila	9.390	1.574	17.230	8.953	28.805
2	Gurami	400	380	2.462	1.300	297
3	Lele	165.025	224.479	260.641	233.574	203.820
4	Patin	6.630	2.330	3.485	2.225	5.429
5	Bawal			5	-	200
6	Bandeng			247	-	-
7	Udang Vanname	112.341	88.462	98.624	70.693	53.891
8	Kepiting			-	40	-
<b>Total</b>		<b>293.786</b>	<b>317.225</b>	<b>382.694</b>	<b>316.785</b>	<b>292.442</b>

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

Berdasarkan Tabel di atas, ada 6 (enam) jenis yang menjadi prioritas utama penyumbang data produksi perikanan budidaya, yaitu nila, gurami, lele, patin, udang vanname dan kepiting. Dari keenam komoditas tersebut, lele merupakan penyumbang terbesar produksi perikanan budidaya di Kota Dumai yaitu sebesar 203.820 kg. Budidaya ikan lele sangat menguntungkan jika dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek pemanfaatan lahan. Budidaya ikan lele dapat memanfaatkan lahan kritis yang tidak bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Ikan lele dapat hidup diperairan yang minim dan kualitas air yang kurang baik.

2. Aspek teknologi. Budidaya ikan lele tidak membutuhkan teknologi yang mutakhir. Yang diperlukan adalah tekun dan telaten.
3. Aspek ekonomi. Budidaya ikan lele tidak memerlukan modal yang besar, sehingga dapat dilakukan pada skala rumah tangga. Hasil dari budidaya ikan lele dapat dijual ataupun dikonsumsi sendiri sebagai pemenuhan gizi keluarga.
4. Aspek sosial. Ikan lele merupakan komoditas yang dapat diterima oleh masyarakat banyak.

Selain lele, udang vanname juga sebagai penyumbang produksi perikanan budidaya terbesar ke dua di Kota Dumai. Saat ini budidaya udang merupakan suatu peluang usaha yang menjanjikan oleh banyak orang. Hal ini dikarenakan udang sebagai salah satu komoditas yang banyak diminati oleh pasar global. Modal dan biaya produksi yang diperlukan untuk budidaya udang sangat besar. Walaupun begitu, keuntungan minimal yang diterima adalah sebesar 30%. Jika dibandingkan dengan data tahun 2023, terjadi penurunan produksi udang vanname sebesar 42,47% pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan oleh infeksi penyakit. Infeksi penyakit dapat menyebabkan terjadinya kematian masal, dan jika dibiarkan akan merugikan petambak. Keparahan infeksi penyakit pada udang bergantung pada kondisi wilayah budidaya, waktu budidaya dan musim.

Mendeteksi udang yang terkena penyakit cukup sulit untuk dilakukan secara langsung, sehingga perlu dilakukan uji laboratorium sampel udang yang memiliki gejala terserang penyakit. Pada umumnya, petambak mengobati udang yang terkena penyakit dengan memberikan antibiotik. Namun saat ini, penggunaan antibiotik dilarang karena dapat menyebabkan resisten patogen terhadap antibiotik dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Ada beberapa cara petambak mengatasi kematian dini akibat terserang penyakit, yaitu sebagai berikut:

1. Jika ada udang yang terkena penyakit, semua udang dalam satu kolam diangkat dan dimatikan. Udang yang sudah mati harus langsung dibersihkan dari kolam agar tidak terjadinya penularan penyakit ke kolam lain. Segera lakukan pengeringan dan disinfeksi

kolam supaya patogen penyebab penyakit mati, tidak menular ke udang yang lain.

2. Membesarkan udang yang tersisa sampai size tertentu agar harganya bisa lebih naik. Namun, solusi ini hanya berlaku pada gejala yang tidak cukup serius dan masih bisa dilanjut siklusnya.

Selain cara di atas, ada beberapa rekomendasi cara mencegah udang vannamee mati dini akibat penyakit, yaitu sebagai berikut.

1. Memilih induk udang yang terbaik.
2. Menjaga kebersihan fasilitas tambak
3. Mengimplementasikan biosekuriti. Biosekuriti merupakan Tindakan pencegahan masuknya inang penyakit agar lingkungan tambak terkontrol dengan maksimal dan bebas dari penyakit.

## 2. Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap merupakan hasil tangkapan ikan yang dilakukan di perairan laut dan perairan umum baik yang didaratkan di pelabuhan maupun non pelabuhan. Data disajikan dalam satuan ton. Khusus Kota Dumai, produksi perikanan tangkap merupakan hasil penangkapan ikan di laut, bukan di perairan umum daratan (PUD).

Produksi perikanan tangkap memiliki peran penting terhadap komoditas perikanan laut terhadap pasokan ikan di Kota Dumai. Jenis ikan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan bervariasi, seperti Acang-acang bombay atau yang dikenal dengan nama ikan Lomek, Bawal Putih, Belanak, Bulu Ayam, Gemprang, Gerot-gerot, Golok-Golok, Gulamah, Hiu Pilus, Kakap, Kerapu Batik, Selanget, Senangin, Layur, Manyung Besar, Pari Kembang, Pucuk Nipah, Rajungan, Sembilang, Tenggiri Papan, Tetengkek, Udang Harimau, Udang Orange, Udang Pacet dan Udang Putih. Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.9 Capaian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024**

No	Jenis Ikan	Produksi (Kg)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Acang-acang Bombay ( <i>Harpodon nehereus</i> )	73.120	139.087	201.051	261.736	258.753
2	Bawal Putih ( <i>Pampus argenteus</i> )	4.126	10.635	4.307	1.309	826

No	Jenis Ikan	Produksi (Kg)				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Belanak ( <i>Mugil cephalus</i> )	1.001	4.985	1.243	775	8.480
4	Bulu Ayam ( <i>Thryssa hamiltonii</i> )	58.865	50.455	37.155	65.154	61.161
5	Gemprang ( <i>Ilisha elongata</i> )	79.018	96.364	166.302	179.927	166.386
6	Gerot-gerot ( <i>Pomadasys maculatus</i> )	62				1.104
7	Golok-golok ( <i>Chirocentrus dorab</i> )	16.387	39.853	56.903	33.062	39.268
8	Gulamah ( <i>Gymnocranius griseus</i> )	15.127	14.296	11.546	3.073	3.390
9	Hiu Pilus ( <i>Rhizoprionodon acutus</i> )	1.543	7.631	-	1.891	4.542
10	Kakap ( <i>Liopropoma randalli</i> )	13.397	25.673	57.009	48.045	48.039
11	Kerapu Batik ( <i>Epinephelus polyphkadion</i> )	2.648	3.976	2.979	329	2.771
12	Kuro; Senangin ( <i>Eleutheronema tetradactylum</i> )	52.841	59.808	87.120	78.677	133.623
13	Layur ( <i>Trichiurus lepturus</i> )	8.512	13.763	10.052	24.105	43.364
14	Manyung Besar ( <i>Netuma thalassina</i> )	20.829	31.027	82.514	75.444	88.768
15	Pari Kembang ( <i>Neotrygon kuhlii</i> )	30.635	18.156	38.016	20.749	32.699
16	Pucuk Nipah ( <i>Muraenesox bagio</i> )	1.532	1.026	1.900	6.485	18.077
17	Rajungan ( <i>Portunus pelagicus</i> )	3.728	14.270	25.576	827	9.309
18	Selanget ( <i>Anodontostoma chacunda</i> )					3.574
19	Sembilang Betul ( <i>Plotosus canius</i> )	11.945	20.982	44.928	52.197	107.653
20	Tenggiri Papan ( <i>Scomberomorus guttatus</i> )	49.878	68.620	82.477	89.300	96.256
21	Tetengkek ( <i>Megalaspis cordyla</i> )	8.503	18.238	49.913	29.980	45.948
22	Udang Harimau ( <i>Parapenaeopsis sculptilis</i> )	85.055	3.536	1.866	8.839	4.746
23	Udang Orange ( <i>Atypopenaeus formosus</i> )	31.524	42.275	38.160	43.329	55.381
24	Udang Pacet ( <i>Penaeus semisulcatus</i> )	688				2.412
25	Udang Putih; Udang Api-api ( <i>Metapenaeus eboracensis</i> )	135.385	25.912	19.283	32.200	43.735
<b>Total</b>		<b>706.349</b>	<b>710.568</b>	<b>1.020.300</b>	<b>1.057.433</b>	<b>1.280.265</b>

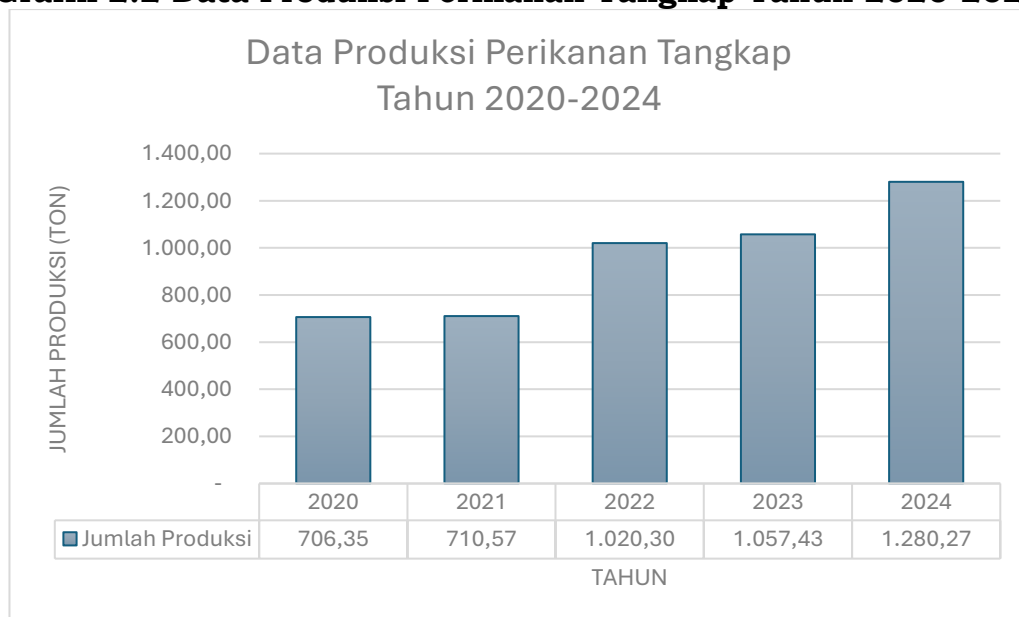
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa produksi perikanan tangkap Kota Dumai masih didominasi dengan ikan Acang-acang bombay atau yang lebih dikenal dengan ikan lomek dan ikan Gemprang atau lebih dikenal dengan nama ikan Puput. Ikan lomek merupakan ikan khas Kota Dumai yang biasa dikonsumsi dalam bentuk ikan segar maupun yang dikeringkan. Ikan lomek hidup diperairan laut, payau maupun lepas pantai yang berlumpur atau berpasir dengan kedalaman 50 meter. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap ikan lomek menjadikan ikan tersebut sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang potensial.

Produksi perikanan tangkap tahun 2024 berdasarkan Tabel 17 adalah sebesar 1.280,27 ton atau mencapai 114,51% dari target tahun 2024. Dapat dilihat pada Tabel 16 di atas, terdapat 2 (dua) jenis ikan yang menurun signifikan hasil tangkapannya, seperti Bawal Putih dan Udang Harimau. Hal ini bisa terjadi karena akibat dari dampak perubahan iklim memicu musim ikan yang tidak menentu. Namun penurunan produksi dari beberapa jenis ikan ini, tidak mempengaruhi terhadap capaian indikator kinerja produksi perikanan tangkap.

Produksi perikanan tangkap diukur, divalidasi dan dilaporkan secara berkala setiap semester. Jika dibandingkan dengan data 5 (lima) tahun sebelumnya, terjadi peningkatan signifikan pada data produksi perikanan tangkap. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan produksi perikanan tangkap, yaitu (1) teknologi tepat guna, (2) penyuluhan, (3) bantuan pemerintah, dan (4) lama melaut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik di bawah ini

**Grafik 2.2 Data Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024**



Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

Capaian kinerja untuk indikator produksi perikanan tangkap menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 1.118 ton dengan realisasi sebesar 1.280,27 ton, tercapai sebesar 114,51% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 1.054,43 ton atau tercapai sebesar

100,42%, maka capaian produksi perikanan tahun 2024 adalah sebesar 17,41%

### **3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan**

Cakupan bina kelompok nelayan merupakan jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah daerah dibagi dengan target pada tahun berkenaan dan dikalikan dengan seratus persen. Cakupan bina kelompok nelayan merupakan persentase kelompok binaan Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun berkenaan yang mendapatkan pembinaan, pendampingan serta bantuan dari pemerintah daerah untuk tumbuh, berkembang dan meningkatkan pendapatan. Kelompok binaan nelayan dikenal dengan nama kelompok usaha bersama (KUB).

KUB nelayan merupakan kelompok yang dibentuk oleh berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2021 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, syarat pembentukan KUB adalah sebagai berikut.

1. Memiliki jumlah anggota kelompok 10-25 orang
2. Pelaku utama yang berada di dalam lingkungan pengaruh seorang ketua kelompok
3. Mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan
4. Memiliki kesamaan dalam tradisi/kebiasaan, domisili, lokasi usaha, status ekonomi dan Bahasa
5. Bersifat informal
6. Memiliki saling ketergantungan antar individu
7. Mandiri dan partisipatif
8. Memiliki aturan/norma yang disepakati bersama
9. Memiliki administrasi yang rapi

Pembentukan KUB dapat memberikan manfaat bagi nelayan Kota Dumai. Adapun manfaat yang dapat diterima adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan rasa kepentingan bersama
2. Menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bersama
3. Mempermudah proses kemitraan usaha
4. Mempermudah akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
5. Meningkatkan kemampuan pengelolaan, pengembangan dan diversifikasi usaha
6. Sebagai pemersatu aspirasi yang murni dan sehat
7. Sebagai wadah yang efektif dan efisien untuk belajar serta bekerja sama
8. Sebagai fasilitator penyampaian dan pelaksanaan kebijakan pemerintah bagi nelayan.

Berdasarkan Tabel 2.6, dapat dilihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan kelompok nelayan meningkat setiap tahunnya. Hal ini tidak lepas dari pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga penyuluh Dinas Perikanan, baik itu yang PNS maupun Non PNS. Pelaksanaan pembinaan biasanya dilakukan secara persuasif. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada nelayan untuk sadar berkelompok. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, penumbuhan kelembagaan pelaku utama adalah proses inisiasi dan fasilitasi tumbuhnya suatu kerjasama yang bersumber dari kesadaran pelaku utama dengan cara bergabung dalam kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan prinsip kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai dan keserasian hubungan antara pelaku utama, sehingga dapat dijadikan sebagai faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok.

Guna terciptanya penumbuhan kelompok atau kelembagaan pelaku utama perikanan, maka perlu dilakukan beberapa hal yang dapat merangsang dan memotivasi masyarakat agar bisa tumbuh mandiri. Dimana, sebelumnya tanpa ada rangsangan atau motivasi, tentunya

sangat sulit berkembang dan mandiri. Apalagi setiap tahunnya, pemerintah terus menggulirkan/menyalurkan bantuan atau program demi membantu masyarakat/kelompok untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan.

#### **4. Cakupan Bina Kelompok Budidaya**

Sama halnya dengan kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. Syarat pembentukan dan hal-hal lain yang perlu dilengkapi, hampir sama dengan pembentukan kelompok nelayan.

Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan merupakan jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah daerah dibagi dengan target pada tahun berkenaan dan dikalikan dengan seratus persen. Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan merupakan persentase kelompok binaan Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun berkenaan yang mendapatkan pembinaan, pendampingan serta bantuan dari pemerintah daerah untuk tumbuh, berkembang dan meningkatkan pendapatan.

Sama halnya dengan kelompok nelayan, cakupan bina kelompok budidaya juga mengalami peningkatan setiap tahunnya (Tabel 2.6). Hal ini dikarenakan adanya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh Dinas Perikanan, baik itu non PNS maupun PNS. Kegiatan pendampingan yang dilakukan tidak hanya berupa pendataan, tetapi juga dilakukan sosialisasi dan sharing ilmu yang bisa diterapkan oleh pembudidaya dalam mengembangkan usaha budidayanya,

#### **5. Angka Konsumsi Ikan**

Sebagai sumber pangan utama, ikan memiliki kandungan gizi yang sangat baik, seperti protein, asam lemak omega 3 dan 6, vitamin, serta berbagai mineral yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan anak, ibu dan janin. Sampai dengan saat ini, Dinas Perikanan memiliki satu program yang menggalakkan masyarakat untuk mau makan ikan.

Ikan dan olahan hasil perikanan merupakan komoditas pangan sumber protein yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian. Sebagai komoditi ekonomi, ikan memiliki peranan penting dalam menghasilkan devisa negara. Untuk itu diperlukan daya saing dengan menjaga mutu dan keamanan pangan. Standarisasi keamanan produksi ikan, selain untuk meningkatkan daya saing dalam pasar dunia, juga untuk menjamin kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Nilai strategis ikan dalam kontribusi ketahanan gizi nasional, meliputi:

1. Potensi produksi yang sangat besar
2. Memiliki kandungan gizi tinggi
3. Harga ekonomis
4. Keragaman jenis sangat tinggi dan tersedia sepanjang tahun
5. Ikan termasuk ke dalam *white meat* yang tingkat kolesterolnya lebih rendah dibandingkan dengan *red meat* seperti daging sapi, daging kambing, dan lain sebagainya.
6. Ikan memiliki asam amino yang lengkap
7. Kandungan lemak, vitamin, dan mineral yang sangat baik
8. Berperan penting dalam Gerakan peningkatan gizi 1000 hari pertama kehidupan.

Untuk melihat tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan oleh Dinas Perikanan dalam meningkatkan konsumsi ikan, diperlukan indikator kinerja berupa angka konsumsi ikan. Angka konsumsi ikan merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar. Ada beberapa manfaat yang didapat dari angka konsumsi ikan, yaitu sebagai berikut:

1. Menggambarkan kebutuhan ikan per jenis di masing-masing wilayah
2. Mengetahui pola konsumsi masyarakat dan analisis preferensi konsumen di suatu daerah
3. Mengetahui sumbangan ikan terhadap konsumsi pangan khususnya pangan hewani.

Adapun cara perhitungan angka konsumsi ikan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AKI = A + B + C$$

Dimana:

- A = Konsumsi di rumah tangga
- B = Konsumsi di luar rumah tangga
- C = Konsumsi tidak tercatat

Catatan:

1. **Konsumsi di Rumah Tangga**, dihitung berdasarkan data susenas BPS yang dikonversi ke dalam bentuk setara utuh segar. Komponen jenis ikan yang dihitung mencakup 4 (empat) kelompok, yaitu (1) ikan dan udang segar, (2) ikan dan udang asin/diawetkan, (3) terasi/petis (bumbu-bumbuan), (4) ikan dalam kelompok makanan jadi (ikan bakar, presto, pindang, bakar, dan lain sebagainya). Data keempat komponen tersebut tidak dapat langsung dijumlahkan karena memiliki satuan yang berbeda, dan masih memerlukan faktor konversi dari ikan dalam bentuk asin/awetan, bumbu-bumbuan ke ikan dalam bentuk segar. Selain itu diperlukan juga konversi untuk ikan yang berasal dari kelompok makanan/minuman jadi dari satuan potong ke satuan kilogram
2. **Konsumsi di Luar Rumah Tangga**, memperhitungkan (1) perkembangan hotel, restoran dan katering, (2) perkembangan tamu hotel dan restoran, (3) perkembangan penyediaan menu ikan oleh catering, (4) potensi kebutuhan ikan di rumah tangga khusus, yaitu (a) orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, Lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu Yayasan atau Lembaga; dan (b) kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.
3. **Konsumsi Tidak Tercatat**, seperti produk olahan ikan berbahan surimi, seperti nugget ikan, bakso ikan, pempek, siomay, otak-otak, dan lain sebagainya.

Konsumsi ikan di Kota Dumai perlu ditingkatkan dalam mengatasi berbagai masalah gizi. Angka konsumsi ikan di Kota Dumai relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan data provinsi Riau maupun nasional. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kota Dumai, diketahui bahwa angka konsumsi ikan Kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebesar 49,64 kg/kapita/tahun, sedangkan tahun 2023 sebesar 44,83.

**Tabel 2.10 Target Capaian Angka Konsumsi Ikan Kota Dumai Tahun 2017-2023 dan Perbandingan dengan Provinsi dan Nasional**

No	Uraian	Realisasi							2024	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Ralisasi
1	Kota Dumai	40,51	40,16	45,51	44,75	45,19	49,64	44,83	50,6	46,60
2	Provinsi Riau	42,36	43,13	47,27	48,49	44,28	50,31	45,87	47,45	46,71
3	Nasional	47,34	50,69	55,50	54,56	55,16	57,27	57,91	62,5	58,76

Catatan: Satuannya menggunakan kg/kapita/tahun

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

\*Data yang digunakan realisasi 2023, sedangkan data 2024 masih menunggu validasi

### 2.1.8 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan merupakan pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan perangkat daerah. Adapun kelompok sasaran layanan yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Nelayan perorangan maupun kelompok nelayan binaan Dinas Perikanan Kota Dumai
2. Pembudidaya daya perorangan maupun kelompok pembudidaya ikan
3. Kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

## 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah merupakan dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Analisis permasalahan pembangunan daerah dihasilkan melalui evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja tahun 2020-2024, dengan mengkaji indikator pembangunan, hambatan implementasi, serta efektivitas program yang telah dilaksanakan.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan yang terjadi antara kinerja pembangunan yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan

serta yang ingin dicapai pada masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintah dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Isu strategis merupakan kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan, artinya jika suatu kondisi/kejadian menjadi isu strategi yang tidak diantisipasi, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

### **2.2.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Berdasarkan rancangan awal RPJMD Kota Dumai, permasalahan pembangunan daerah dibagi berdasarkan aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Adapun identifikasi permasalahan Dinas Perikanan Kota Dumai berdasarkan RPJMD Kota Dumai adalah *masih rendahnya konsumsi ikan pada rumah tangga di Kota Dumai, menunjukkan perlunya peningkatan edukasi gizi masyarakat dan promosi konsumsi hasil laut lokal.*

Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Dumai yang mempunyai tugas dan fungsi pada sektor perikanan. Kebijakan dan strategi di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan protein ikan di Kota Dumai. Oleh karena itu, guna mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai, maka dipetakan permasalahan sebagai berikut:

**Tabel 2.11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perikanan Berdasarkan Ranwal RPJMD Kota Dumai 2025-2029**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Lambatnya pertumbuhan perekonomian Kota Dumai yang berdampak pada rendahnya produktivitas	Rendahnya produktivitas perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya akses teknologi perikanan</li> <li>• Kurang optimalnya program penyusunan</li> </ul>

Sumber: RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029

Dari Tabel di atas, pemetaan permasalahan diatas berdasarkan RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029. Untuk pemetaan permasalahan berdasarkan kewenangan Dinas Perikanan Kota Dumai dapat di lihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.12 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan**

No	Masalah Pokok Berdasarkan RPJMD	Masalah Pokok Berdasarkan Kewenangan	Masalah	Akar Masalah
1	Lambatnya pertumbuhan perekonomian Kota Dumai yang berdampak pada rendahnya produktivitas	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Masih rendahnya produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya untuk peningkatan kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap dan budidaya</li> <li>• Minimnya modal yang dimiliki untuk peningkatan usaha</li> <li>• Penggunaan teknologi yang masih sederhana</li> <li>• Tingginya tingkat pencemaran air laut sehingga mempengaruhi produksi perikanan</li> </ul>
		Penurunan potensi sumber daya ikan	Degradasi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah penangkapan yang menyatu dengan jalur pelayanan</li> <li>• Masih menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan</li> </ul>

No	Masalah Pokok Berdasarkan RPJMD	Masalah Pokok Berdasarkan Kewenangan	Masalah	Akar Masalah
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Rusaknya ekosistem mangrove</li> <li>Limbah industri</li> </ul>
		Nilai tambah produk perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimnya diversifikasi olahan produk perikanan</li> <li>Pengolahan belum sesuai standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan bahan baku yang terbatas</li> <li>Kurangnya pengetahuan dan manfaat yang didapat dari diversifikasi olahan produk perikanan</li> <li>Teknologi yang digunakan masih sederhana</li> <li>Tidak memiliki jaringan pemasaran</li> <li>Belum memiliki izin usaha</li> <li>Sarana dan prasarana tidak mendukung</li> </ul>
		Menurunnya angka konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan masih di bawah standar provinsi dan nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya informasi terkait kandungan gizi dan manfaat ikan</li> <li>Ikan dianggap tidak memiliki nilai gizi dibandingkan produk hewan lainnya, seperti daging sapi dan ayam</li> <li>Tidak ada variasi menu/olahan ikan yang membuat masyarakat gemar makan ikan</li> </ul>

### 2.2.2 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis adalah suatu kondisi yang dampaknya signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa depan. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap pembangunan di Kota Dumai. Berdasarkan hal tersebut, secara umum isu strategis perangkat daerah yang mempengaruhi isu strategis Kota Dumai berdasarkan isu kemampuan dan

kesejahteraan ekonomi adalah belum optimalnya ketersediaan, distribusi, stabilisasi harga, serta aksesibilitas ikan, ditambah dengan rendahnya budaya makan ikan di Kota Dumai. Berdasarkan aspek ekonomi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat adalah Peningkatan produktivitas tanaman baik pangan, hortikultura, Perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan masyarakat kota terutama adanya peluang terhadap pangsa bagi pekerja sektor industri yang terus mengalami peningkatan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya signifikan di masa datang. Berdasarkan hasil analisis terhadap Gambaran pelayanan perangkat daerah, ditetapkan isu strategis Dinas Perikanan Kota Dumai sebagaimana pada Tabel berikut:

**Tabel 2.13 Penetapan Isu-Isu Strategis Dinas Perikanan**

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Peningkatan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Pemasaran hasil penangkapan dan budidaya ikan bersifat individu, belum terintegrasi dan sistematis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya ketersediaan, distribusi, stabilisasi harga, serta aksesibilitas ikan, ditambah dengan rendahnya budaya makan ikan di Kota Dumai</li> <li>• Peningkatan produktivitas tanaman baik pangan, hortikultura, Perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan masyarakat kota terutama adanya peluang terhadap pangsa bagi pekerja sektor industri yang terus mengalami peningkatan</li> </ul>
2	Peningkatan Produksi Perikanan tangkap dan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana belum mampu mendukung peningkatan produksi secara optimal</li> <li>• Lahan yang tersedia untuk perikanan budidaya masih terbatas</li> <li>• Tingkat Penguasaan teknologi yang masih rendah</li> </ul>	

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

### **2.2.3 TELAAHAN VISI, MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda

pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai. Visi yang dituangkan dalam RPJMD, dirumuskan, dibahas, dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Adapun visi pembangunan Kota Dumai tahun 2025-2029 adalah

**“KOTA INDUSTRI YANG UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU TAHUN 2029”**

Secara filosofi, visi tersebut mencerminkan makna dan harapan besar bagi Kota Dumai untuk berkembang menjadi pusat industri yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat, kelestarian lingkungan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Melayu (RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dumai sebagai **Kota Industri yang Unggul** menunjukkan bahwa Kota Dumai ingin menjadi kota industri yang kompetitif, efisien, dan inovatif. Keunggulan ini dapat diukur berdasarkan daya saing sektor industri, penerapan teknologi modern, keberlanjutan ekonomi, serta kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan potensi sebagai kota Pelabuhan dan pusat industri pengolahan, Kota Dumai diharapkan mampu menarik investasi, meningkatkan produktivitas industri dan menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif.
2. Dumai sebagai Kota Industri yang **Sejahtera** mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Industri yang berkembang harus berdampak positif terhadap kehidupan Masyarakat, baik melalui peningkatan lapangan kerja, pendapatan yang layak, maupun fasilitas umum yang memadai. Sejahtera juga mencakup aspek sosial, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kota Dumai.
3. Dumai sebagai Kota Industri yang **Berkelanjutan** berarti menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Kota Dumai diharapkan

dapat mengembangkan industri yang ramah lingkungan, mengelola sumber daya alam secara bijaksana serta mengadopsi prinsip ekonomi hijau agar Pembangunan industri tidak merusak lingkungan dan tetap memberi manfaat bagi generasi mendatang.

4. Dumai yang **Berlandaskan Budaya Melayu** mencerminkan Kota Dumai dengan akar budaya Melayu yang kuat ingin memastikan bahwa pembangunan kota tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal. Berlandaskan budaya Melayu berarti menjadikan adat, norma, dan kearifan lokal sebagai landasan dalam tata kelola pemerintahan, kehidupan sosial, serta pengembangan industri.
5. **Tahun 2029** menjadi target pencapaian visi pembangunan tersebut, menandakan periode perencanaan dan implementasi strategi pembangunan. Dalam rentan waktu ini, diharapkan terdapat kemajuan signifikan dalam aspek industri, kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta pelestarian budaya, sehingga Kota Dumai dapat mencapai posisi yang diharapkan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka telah ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan, yaitu sebagai berikut.

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan
3. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Produktif.
4. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Berdasarkan keterangan di atas, untuk merealisasikan visi, misi yang mendukung kegiatan perikanan adalah Misi 3, yaitu

**“Mewujudkan Perekonomian Kota yang Produktif”**

Misi ketiga bertujuan untuk menciptakan perekonomian Kota Dumai yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan perkembangan industri, diperlukan

strategi yang mampu mendorong produktivitas di berbagai sektor, seperti industri, pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, dengan menyediakan akses terhadap permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta kemudahan regulasi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Selain itu, pembangunan ekonomi yang produktif juga akan diarahkan pada pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing daerah. Pemerintah akan mendorong digitalisasi ekonomi, memperkuat rantai pasok industri lokal, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, baik di tingkat nasional maupun internasional. Prinsip keberlanjutan juga menjadi perhatian utama dalam pertumbuhan ekonomi, dengan memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dilakukan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Kota Dumai dapat menjadi kota industri yang unggul dengan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun untuk mendukung misi ini, Dinas Perikanan Kota Dumai mempunyai tujuan untuk **“Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan”**. Tolok ukur dari tujuan tersebut adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi). Sasaran yang ingin dicapai adalah **“(1) Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap, (2) Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya, dan (3) Meningkatkan Konsumsi Ikan oleh Masyarakat”**. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel di bawah ini

**Tabel 2.14 Kaitan Misi, Tujuan, Sasaran Kota Dumai dengan Peran Dinas Perikanan Kota Dumai**

No	Misi Kepala Daerah	Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat daerah	Sasaran Perangkat daerah
1	Mewujudkan Perekonomian Kota yang Produktif	Terwujudnya Perekonomian Kota Dumai yang Maju dan Berdaya Saing	Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap

No	Misi Kepala Daerah	Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat daerah	Sasaran Perangkat daerah
					2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya 3. Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen penting dalam penjabaran visi dan misi daerah, khususnya Kota Dumai. Penetapan tujuan dan sasaran perlu dilakukan dalam bentuk terukur dan spesifik. Selain menjabarkan visi dan misi daerah, serta menjawab permasalahan pembangunan dan isu strategis, juga merupakan penyelarasan capaian indikator kinerja pembangunan Kota Dumai dengan indikator kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai. Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode jangka waktu tertentu dan dirumuskan dalam bentuk tindakan dan alokasi sumberdaya yang dapat diukur.

Visi Pembangunan Kota Dumai tahun 2025-2029 dirumuskan setelah mengkaji kondisi umum daerah, menganalisis potensi dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang kemudian dirumuskan sebagai berikut, yaitu **"Kota Industri yang Unggul, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029"**. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Dumai Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang berdaya saing
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan
3. Mewujudkan perekonomian kota yang produktif
4. Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

Berdasarkan pernyataan visi dan misi pembangunan Kota Dumai tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan Kota Dumai yang sesuai dengan Dinas Perikanan Kota Dumai adalah tujuan 5, yaitu **"Terwujudnya Perekonomian Kota Dumai yang Maju dan Berdaya Saing"**. Adapun sasaran pokok dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan per kapita
- b. Produktivitas ekonomi
- c. Integrasi ekonomi domestik dan global
- d. Pemerataan pertumbuhan ekonomi dari pusat kota hingga ke kelurahan
- e. Transformasi digital

Berdasarkan tujuan dari misi ketiga yang tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan dalam mendukung visi dan misi Wali Kota Dumai adalah **"Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan"**. Sebagai tindak lanjut terhadap rumusan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran Dinas Perikanan Kota Dumai adalah **(1) Meningkatkan produksi perikanan tangkap, (2) meningkatnya produksi perikanan budidaya, dan (3) meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat Kota Dumai.**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, diperlukan penetapan indikator kinerja untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran dapat direalisasikan. Penetapan indikator kinerja ini digunakan untuk perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja. Penetapan indikator kinerja mempertimbangkan prinsip SMART-C, yaitu spesifik, *measurabel*, *agreeable*, *realistic*, dan *time-bounded*. Adapun indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2025-2029 dituangkan dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-						
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>Misi 3: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG PRODUKTIF</b>											
<b>Tujuan: TERWUJUDNYA PEREKONOMIAN KOTA DUMAI YANG MAJU DAN BERDAYA SAING</b>											
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan		NTN (Nilai Tukar Nelayan)	Indeks	105	107	109	112	115	118	
			NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	Indeks	100	102	104	106	108	110	
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.280	1.290	1.300	1.310	1.320	1.330	
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	340,15	350,36	360,87	371,69	382,85	394,34	
		Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat Kota Dumai	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	46,8	47	47,5	48	48,5	49	Untuk kedepannya AKI berganti menjadi KIM (Konsumsi Ikan Masyarakat) dan akan dilakukan penyesuaian target

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2025)

### **3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

#### **3.2.1 Strategi Dinas Perikanan Kota Dumai**

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran pemerintah Kota Dumai yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja capaian dalam 5 (lima) tahun. Strategi Dinas Perikanan dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merealisasikan misi ke-3 Pemerintah Kota Dumai dengan sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya.

Strategi Dinas Perikanan Pemerintah Kota Dumai disusun secara komprehensif agar dapat mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 15 menyatakan bahwa Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan hal tersebut arah kebijakan dibuat untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan. Perumusan strategi dilakukan berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
3. Mengevaluasi berbagai faktor internal dan eksternal dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka strategi Dinas Perikanan Kota Dumai dalam mencapai visi dan misi Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

**Gambar 3.1 Diagram Analisis SWOT Perumusan Strategi Jangka Menengah**

Faktor Eksternal	<p><b>Peluang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya inovasi dan teknologi di bidang perikanan</li> <li>2. Meningkatnya konsumsi ikan di Kota Dumai</li> <li>3. Letak Kota Dumai yang strategis</li> </ol>	<p><b>Tantangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya kewenangan Dinas Perikanan Kota Dumai akibat dari penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>2. Menyatunya wilayah penangkapan dengan jalur pelayaran</li> <li>3. Penurunan kualitas perairan</li> <li>4. Pemasaran hasil perikanan yang belum sistematis</li> <li>5. Pola 53emba masyarakat pesisir yang masih tradisional</li> </ol>
Faktor Internal	<p><b>Kekuatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOTK Dinas Perikanan Kota Dumai yang jelas</li> <li>2. Penyederhanaan birokrasi</li> </ol> <p><b>Kelemahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya sumber daya manusia perikanan dari segi kualitas maupun kuantitas</li> <li>2. Belum memiliki sarana pendukung yang memadai</li> </ol>	
	<p>Alternatif strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi perikanan tangkap</li> <li>2. Optimalisasi perikanan budidaya</li> <li>3. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</li> </ol>	

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

Berdasarkan Gambar di atas, dapat dilihat bahwa ada 3 (tiga) alternatif strategi yang dihasilkan dari perumusan strategi. Adapun alternatif strategi tersebut adalah (1) optimalisasi pengelolaan perikanan tangkap, (2) optimalisasi pengelolaan perikanan budidaya, dan (3) optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Ketiga alternatif strategi tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Dumai yang telah ditetapkan untuk periode 2025-2029 (Tabel di bawah ini).

**Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Dinas Perikanan Kota Dumai**

Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 3: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG PRODUKTIF</b>		
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya produksi perikanan</li> <li>2. Meningkatnya binaan pelaku usaha perikanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pengelolaan perikanan tangkap</li> <li>2. Optimalisasi pengelolaan perikanan budidaya</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi
	3. Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Kota Dumai	3. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Berdasarkan tabel di atas, maka keterkaitan antara strategi RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029 dengan strategi Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3 Keterkaitan Strategi RPJMD 2025-2029 dengan Strategi Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2025-2029**

No	Strategi RPJMD Kota Dumai 2025-2029	Strategi Dinas Perikanan Tahun 2025-2029
1	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan berkelanjutan	1. Optimalisasi pengelolaan perikanan tangkap 2. Optimalisasi pengelolaan perikanan budidaya 3. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Mengacu pada strategi RPJMD dan strategi Dinas Perikanan Kota Dumai, ada 1 (satu) program prioritas Walikota yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan Kota Dumai, yaitu pemberian bantuan untuk peningkatan produktivitas dan ketahanan masyarakat berupa budidaya ikan bioflok.

Penahapan pembangunan rencana strategis Dinas Perikanan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan. Penahapan renstra Dinas Perikanan dapat disajikan pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 3.4 Penahapan Renstra Dinas Perikanan**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<b>Menguatkan SDM dan Infrastruktur dalam meningkatkan perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan</b>	<b>Memantapkan Sistem, Sarana, dan Sumber Daya dalam Mewujudkan Kota Industri yang Unggul</b>	<b>Meningkatkan Daya Saing melalui Hilirisasi Industri dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>Membangun Dumai yang Tangguh dengan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan</b>	<b>Mewujudkan Dumai Sebagai Kota Industri dan Berkelanjutan</b>
Penataan Peningkatan upaya dan koordinasi serta sinergitas sektor untuk ketersediaan air, energi dan pangan daerah	Pengembangan peningkatan upaya dan koordinasi serta sinergitas sektor untuk ketersediaan air, energi dan pangan daerah	Penguatan peningkatan upaya dan koordinasi serta sinergitas sektor untuk ketersediaan air, energi dan pangan daerah	Pemantapan peningkatan upaya dan koordinasi serta sinergitas sektor untuk ketersediaan air, energi dan pangan daerah	Pemantapan Peningkatan upaya dan koordinasi serta sinergitas sektor untuk ketersediaan air, energi dan pangan daerah

### 3.2.2 Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kota Dumai

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah Kota Dumai, diwujudkan melalui strategi dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi pembangunan yang difokuskan pada pencapaian prioritas tujuan dan sasaran misi pembangunan. Sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan perencanaan pembangunan, arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah agar lebih efektif dalam menetapkan dan mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Selain itu, arah kebijakan juga menjadi panduan dalam merumuskan strategi yang dipilih agak tetap selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Perumusan arah kebijakan bertujuan untuk merasionalkan pilihan strategi sehingga lebih focus dan sesuai dengan mekanisme pelaksanaannya

Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Adapun arah kebijakan Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>VISI: KOTA INDUSTRI YANG UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU TAHUN 2029</b>			
<b>MISI 3: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG PRODUKTIF</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya produksi perikanan</li> <li>2. Meningkatnya binaan pelaku usaha perikanan</li> <li>3. Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Kota Dumai</li> </ol>	Optimalisasi pengelolaan perikanan tangkap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil</li> <li>2. Penyediaan data dan informasi perikanan tangkap</li> <li>3. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap</li> <li>4. Pengembangan kapasitas nelayan kecil</li> <li>5. Fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi nelayan kecil</li> <li>6. Pembinaan, pendampingan dan pelatihan bagi nelayan kecil</li> </ol>

<b>VISI: KOTA INDUSTRI YANG UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU TAHUN 2029</b>			
<b>MISI 3: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG PRODUKTIF</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan</li> <li>2. Pembinaan dan pemantauan serta pelatihan bagi pembudidaya ikan</li> <li>3. Penyediaan data dan informasi perikanan budidaya</li> <li>4. Pengembangan kapasitas pembudidayaan ikan</li> <li>5. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat</li> <li>6. Fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan</li> </ol>
	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan volume dan nilai produksi perikanan</li> <li>2. Inovasi olahan dan penerapan standarisasi produk</li> </ol>

Berdasarkan tabel di atas, arah kebijakan renstra perangkat daerah, diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD serta strategi RPJMD dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran perangkat daerah. Untuk melihat keterkaitan antara arah kebijakan RPJMD dengan arah kebijakan renstra perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.6 Keterkaitan Arah Kebijakan RPJMD dengan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**

<b>No</b>	<b>Operasionalisasi NSPK</b>	<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>	<b>Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah</b>	<b>Ket</b>
1		Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan Perkebunan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (Smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, sarana dan prasarana lainnya)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil</li> <li>2. Penyediaan data dan informasi perikanan tangkap</li> <li>3. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap</li> </ol>	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
			4. Pengembangan kapasitas nelayan kecil 5. Fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi nelayan kecil 6. Pembinaan, pendampingan dan pelatihan bagi nelayan kecil 7. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan 8. Pembinaan dan pemantauan serta pelatihan bagi pembudidaya ikan 9. Penyediaan data dan informasi perikanan budidaya 10. Pengembangan kapasitas pembudidayaan ikan 11. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 12. Fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan 13. Peningkatan volume dan nilai produksi perikanan 14. Inovasi olahan dan penerapan standarisasi produk	

### 3.2.3 Program Prioritas Perangkat Daerah

Adapun program prioritas yang menjadi fokus utama perangkat daerah dalam menjalankan visi misi kepala daerah sesuai dengan janji politik dan agenda pembangunan daerah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.7 Program Prioritas Walikota Dumai yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah**

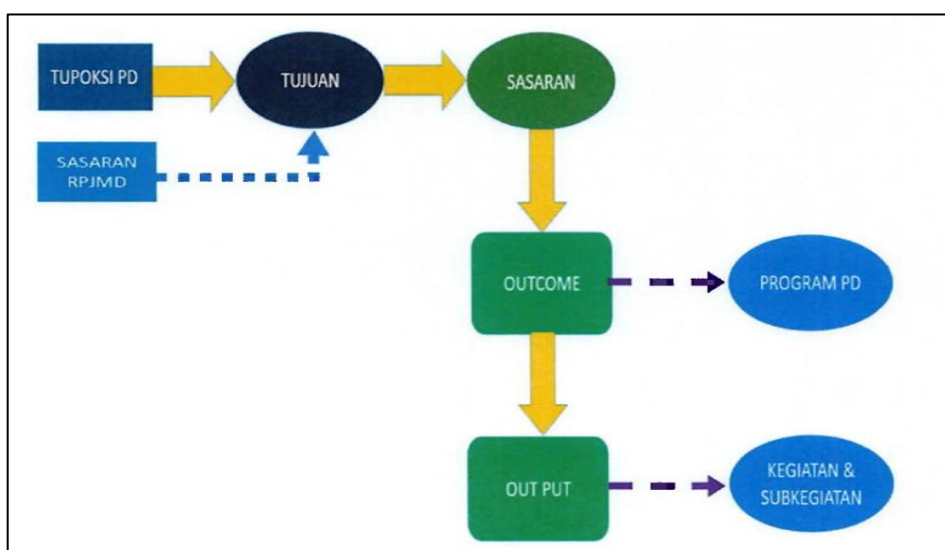
No	Tujuan	Sasaran	Prioritas Walikota	Prioritas Perangkat Daerah	Isu Terkait
<b>MISI 3: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG PRODUKTIF</b>					
<b>PRIORITAS DAERAH 3: PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>					
1	Terwujudnya Perekonomian kota Dumai yang maju dan berdaya saing	Produktivitas ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian bantuan untuk peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan masyarakat (bantuan ayam dan bioflok)</li> <li>Pengembangan perternakan sapi dan kambing</li> </ol>	Pemberian bantuan untuk peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan masyarakat (budidaya ikan dengan sistem bioflok)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan dan kesejahteraan ekonomi</li> <li>Peningkatan kualitas pangan dan energi</li> </ol>

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Sesuai dengan Bidang Urusan

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan penjabaran secara rinci ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Pada dasarnya, program kerja merupakan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang harus diambil untuk memecahkan persoalan pembangunan perikanan secara sistematis dan berkesinambungan.

Kerangka perumusan program/kegiatan/subkegiatan dalam rencana strategis perangkat daerah melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, identifikasi isu-isu strategis yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Kedua, perumusan visi misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Ketiga, penyusunan program-program strategis yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Keempat pengembangan kegiatan operasional yang lebih rinci dalam setiap program. Kelima, menentukan sub kegiatan yang lebih spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan kegiatan. Terakhir, penyusunan indikator kinerja dan target yang jelas untuk setiap tingkatan.



**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan  
Renstra Perangkat Daerah**

Perumusan program dan kegiatan pembangunan Perikanan dan Kelautan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 sebagai payung hukum.

Mengacu kepada ketentuan tersebut, diharapkan program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Dumai dapat lebih terarah dan sinergi. Secara rinci, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN</b>							
3.1.3. Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
					Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)		
					Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
					Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan,	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Jumlah Kegiatan pada Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
					Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0012 - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat Kota Dumai			Angka Konsumsi Ikan		
			Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Kota Dumai		Angka Konsumsi Ikan	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan	3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
				Jumlah dokumen penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 5 (lima) tahun. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Perikanan Kota Dumai, serta program prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah Kota Dumai selama periode 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan Kota Dumai**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				9.120.778.810		9.901.507.000		9.906.507.000		10.206.507.000		10.375.000.000		
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.694.271.810		6.225.000.000		6.015.000.000		6.215.000.000		6.235.000.000		
Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	Persentase Penunjang Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	5.694.271.810	100	6.225.000.000	100	6.015.000.000	100	6.215.000.000	100	6.235.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				73.500.000		116.000.000		116.000.000		116.000.000		116.000.000		
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	73.500.000	4	116.000.000	4	116.000.000	4	116.000.000	4	116.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.500.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	3.500.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000		
3.25.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				70.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	70.000.000	4	110.000.000	4	110.000.000	4	110.000.000	4	110.000.000		
3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.934.271.810		4.006.000.000		4.006.000.000		4.006.000.000		4.006.000.000		
Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	38	3.934.271.810	38	4.006.000.000	38	4.006.000.000	38	4.006.000.000	38	4.006.000.000		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0		2		2		2		2			
3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.934.271.810		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	38	3.934.271.810	38	4.000.000.000	38	4.000.000.000	38	4.000.000.000	38	4.000.000.000		
3.25.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	0	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000		
3.25.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				70.000.000		110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	70.000.000	2	110.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
3.25.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				70.000.000		110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	70.000.000	2	110.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				40.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	5	40.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000		
3.25.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				40.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	5	40.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000		
3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				324.000.000		352.000.000		352.000.000		352.000.000		352.000.000		
Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	324.000.000	4	352.000.000	4	352.000.000	4	352.000.000	4	352.000.000		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	7.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	80.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
3.25.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	20.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000		
3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
3.25.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		
3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000		
3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		170.000.000		
Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	5	170.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	82	8		8		8		8		8			
3.25.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	82	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000		
3.25.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		70.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	5	70.000.000		
3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				972.500.000		1.091.000.000		1.091.000.000		1.091.000.000		1.091.000.000		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	972.500.000	1	1.091.000.000	1	1.091.000.000	1	1.091.000.000	1	1.091.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.25.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.500.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				206.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	206.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
3.25.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	15.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				750.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	750.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000		
3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130.000.000		340.000.000		140.000.000		340.000.000		340.000.000		
Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	130.000.000	2	340.000.000	2	140.000.000	2	340.000.000	2	340.000.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	13		13		13		13		13			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		1		0		1		1			
3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	100.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000		
3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	13	30.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000		
3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		200.000.000		0		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				150.000.000		310.000.000		410.000.000		510.000.000		610.000.000		
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.280,27	1.290	150.000.000	1.300	310.000.000	1.310	410.000.000	1.320	510.000.000	1.330	610.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN	
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		310.000.000		410.000.000		510.000.000		610.000.000		
Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	0	150.000.000	60	310.000.000	60	410.000.000	60	510.000.000	60	610.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	0	10		20		30		40		50			
	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	22	26		26		27		28		30			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	0	0	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000		
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	22	26	50.000.000	26	60.000.000	27	60.000.000	28	60.000.000	30	60.000.000		
3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				100.000.000		200.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	0	10	100.000.000	20	200.000.000	30	300.000.000	40	400.000.000	50	500.000.000		
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				3.046.507.000		3.081.507.000		3.186.507.000		3.186.507.000		3.225.000.000		
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	292,44	350,36	3.046.507.000	360,87	3.081.507.000	371,69	3.186.507.000	382,85	3.186.507.000	394,34	3.225.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN	
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				1.801.507.000		1.941.507.000		1.941.507.000		1.941.507.000		1.980.000.000		
Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	20	0	1.801.507.000	25	1.941.507.000	28	1.941.507.000	30	1.941.507.000	32	1.980.000.000		
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	13	8		8		8		8		8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	25	25		25		25		25		25			
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				1.731.507.000		1.811.507.000		1.811.507.000		1.811.507.000		1.850.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	13	8	1.731.507.000	8	1.811.507.000	8	1.811.507.000	8	1.811.507.000	8	1.850.000.000		
3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	20	0	0	25	50.000.000	28	50.000.000	30	50.000.000	32	50.000.000		
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				70.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	25	25	70.000.000	25	80.000.000	25	80.000.000	25	80.000.000	25	80.000.000		
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				1.245.000.000		1.140.000.000		1.245.000.000		1.245.000.000		1.245.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Jumlah Kegiatan pada Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	1	1	1.245.000.000	1	1.140.000.000	1	1.245.000.000	1	1.245.000.000	1	1.245.000.000		
	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	250	250		250		250		250		250			
	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				680.000.000		750.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	680.000.000	1	750.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000		
3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				120.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	1	120.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	250	250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000		
3.25.04.2.04.0012 - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				380.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	1	1	380.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000		
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				230.000.000		285.000.000		295.000.000		295.000.000		305.000.000		
Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Kota Dumai	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	46,6	47	230.000.000	47,5	285.000.000	48	295.000.000	48,5	295.000.000	49	305.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN	
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				215.000.000		270.000.000		280.000.000		280.000.000		290.000.000		
Jumlah dokumen penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	0,1	0,2	215.000.000	0,3	270.000.000	0,4	280.000.000	0,5	280.000.000	0,6	290.000.000		
3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				215.000.000		270.000.000		280.000.000		280.000.000		290.000.000		
Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	0,1	0,2	215.000.000	0,3	270.000.000	0,4	280.000.000	0,5	280.000.000	0,6	290.000.000		

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

**Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program  
Prioritas Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
<b>3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN</b>				
1.	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
			3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
2.	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
3.	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Kota Dumai	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
			3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
			3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja pelayanan bidang urusan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Perikanan Kota Dumai dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai terpilih. Penetapan indikator berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penetapan indikator kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai dikenal dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Indikator Kinerja Utama sebaiknya ditetapkan indikator kinerja yang jelas, spesifik dan terukur (*measurable*). IKU sebaiknya dinyatakan secara eksplisit dan rinci, sehingga menjadi jelas apa yang diukur.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan indikator kinerja tujuan dan sasaran dengan formulasi sebagai berikut.

### 1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

$$\text{Nilai Tukar Nelayan} = \frac{\text{Total Penerimaan Nelayan}}{\text{Total Pengeluaran Nelayan}} \times 100$$

Keterangan:

NTN > 100, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Artinya pendapatan nelayan naik lebih besar daripada pengeluarannya (surplus)

NTN < 100, kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi. Artinya pendapatan nelayan lebih kecil daripada pengeluarannya (defisit)

NTN = 100, memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi (impas)

## 2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

$$\text{Nilai Tukar Pembudidaya Ikan} = \frac{\text{Total Penerimaan Pembudidaya Ikan}}{\text{Total Pengeluaran Pembudidaya Ikan}} \times 100$$

Keterangan:

NTPi > 100, berarti pembudidaya mengalami peningkatan daya beli karena kenaikan harga produksi lebih besar dari kenaikan harga input produksi dan konsumsi rumah tangganya

NTPi < 100, berarti pembudidaya mengalami defisit/penurunan daya belinya. Hal ini dikarenakan kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga input produksi dan barang konsumsi rumah tangganya.

NTPi = 100, berarti pembudidaya mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga input produksi dan barang konsumsi rumah tangganya

## 3. Produksi Perikanan Tangkap

$$\text{Produksi perikanan tangkap} = \sum \text{Hasil tangkapan Ikan di Laut}$$

## 4. Produksi Perikanan Budidaya

$$\text{Produksi perikanan budidaya} = \sum \text{Hasil budidaya ikan}$$

## 5. Angka Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat Kota Dumai selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar. Rumus perhitungan konsumsi ikan masyarakat adalah sebagai berikut:

$$AKI = A + B + C$$

Dimana:

A = Konsumsi di rumah tangga

B = Konsumsi di luar rumah tangga

C = Konsumsi tidak tercatat

Catatan:

1. **Konsumsi di Rumah Tangga**, dihitung berdasarkan data susenas BPS yang dikonversi ke dalam bentuk setara utuh segar. Komponen jenis ikan yang dihitung mencakup 4 (empat) kelompok, yaitu (1) ikan dan udang segar, (2) ikan dan udang asin/diawetkan, (3) terasi/petis (bumbu-bumbuan), (4) ikan dalam kelompok makanan jadi (ikan bakar, presto, pindang, bakar, dan lain sebagainya). Data keempat komponen tersebut tidak dapat langsung dijumlahkan karena memiliki satuan yang berbeda, dan masih memerlukan faktor konversi dari ikan dalam bentuk asin/awetan, bumbu-bumbuan ke ikan dalam bentuk segar. Selain itu diperlukan juga konversi untuk ikan yang berasal dari kelompok makanan/minuman jadi dari satuan potong ke satuan kilogram.
2. **Konsumsi di Luar Rumah Tangga**, memperhitungkan (1) perkembangan hotel, restoran dan katering, (2) perkembangan tamu hotel dan restoran, (3) perkembangan penyediaan menu ikan oleh catering, (4) potensi kebutuhan ikan di rumah tangga khusus, yaitu (a) orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, Lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu Yayasan atau Lembaga; dan (b) kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.
3. **Konsumsi Tidak Tercatat**, seperti produk olahan ikan berbahan surimi, seperti nugget ikan, bakso ikan, pempek, siomay, otak-otak, dan lain sebagainya.

Untuk selanjutnya, angka konsumsi ikan berubah menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM), dimana perhitungannya menjadi:

$$KIM = \sum_{i=1}^n \frac{KIDRT \times WEIND}{JP}$$

Dimana:

KIM = Konsumsi Ikan Masyarakat

KIDRT = Konsumsi Ikan dalam rumah tangga

WEIND = Penimbang individu ini digunakan untuk memberi bobot ke sampel rumah tangga (contoh 1 RT mewakili 10 RT)

JP = Jumlah Penduduk

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 terdapat perubahan istilah Angka Konsumsi Ikan (AKI) menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) dan telah ditetapkan besaran target pada tahun 2025-2029 sebesar 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 dan sebesar 28,63 pada tahun 2029. Perolehan angka tersebut dihitung berdasarkan konsumsi ikan masyarakat dalam rumah tangga secara tertimbang setara utuh segar.

Berdasarkan hasil perhitungan terbaru yang diumumkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) pada surat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor: B.1753/DJPDSPKP.5/TU.210/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025, maka Dinas Perikanan harus melakukan perubahan terhadap target Indikator Kinerja Utama Angka Konsumsi Ikan. Adapun rincian secara jelas terhadap besaran target pada Tahun 2025-2029 terlampir pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.4 Proyeksi Angka Konsumsi Ikan Kota Dumai Sebelum Perubahan dan Setelah Perubahan Menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat**

No	Tahun	AKI (Kg/Kap/Thn) Sebelum Perubahan	KIM (Kg/Kap/Thn) Setelah Perubahan
1	2025	46,8	36,67
2	2026	47,0	36,77
3	2027	47,5	36,86
4	2028	48,0	36,97
5	2029	48,5	37,06

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2025)

Adapun data baseline konsumsi ikan masyarakat Kota Dumai pada tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.5 Data Baseline Konsumsi Ikan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2019-2024**

No	Tahun	AKI (Kg/Kapita/Tahun)	KIM (Kg/Kapita/Tahun)
1	2019	45,51	36,42
2	2020	44,75	33,84
3	2021	45,19	34,47
4	2022	49,64	40,23

No	Tahun	AKI (Kg/Kapita/Tahun)	KIM (Kg/Kapita/Tahun)
5	2023	44,83	35,13
6	2024	46,60	35,18

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2025)

Pada rancangan Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai, target Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2025-2029 merupakan proyeksi dari realisasi tahun 2020-2024. Adapun target capaian yang terdapat pada Tabel 4.6 menjadi dasar untuk indikator kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Dumai periode tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. IKK merupakan alat yang membantu dalam pemantauan dan pengendalian kinerja serta pengambilan keputusan yang lebih tepat. IKK bertujuan untuk memberikan informasi tentang kinerja suatu organisasi atau individu, memantau kemajuan, dan membantu dalam pengambilan keputusan.

IKK sangat penting untuk memastikan bahwa suatu organisasi atau individu bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan IKK, Dinas Perikanan Kota Dumai dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengukur kemajuan, dan membuat keputusan yang lebih tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun IKK Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan rumus IKK dapat dilihat pada Tabel 4.8 di bawah ini.

**Tabel 4.6 Target Capaian Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025-2029**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi					Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-						Keterangan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>Misi 3: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG PRODUKTIF</b>																
<b>Tujuan: TERWUJUDNYA PEREKONOMIAN KOTA DUMAI YANG MAJU DAN BERDAYA SAING</b>																
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan		NTN (Nilai Tukar Nelayan)	Indeks	0	0	0	0	0	105	107	109	112	115	118	
			NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	Indeks	0	0	0	0	0	100	102	104	106	108	110	
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Perikanan Tangkap	Ton	585,8	710,6	1.020,3	1.057,43	1.280,27	1.280	1.290	1.300	1.310	1.320	1.330	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	284,9	311,8	382,69	344,07	292,44	340,15	350,36	360,87	371,69	382,85	394,34	
		Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat Kota Dumai	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	44,75	45,19	49,64	44,83	46,6	46,8 36,67	47 36,77	47,5 36,86	48 36,97	48,5 37,06	49 37,14	Selanjutnya AKI berubah menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) dan akan dilakukan penyesuaian target

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

**Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perikanan Kota Dumai**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
1.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	positif	Indeks	0	105	107	109	112	115	118	
2.	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	positif	Indeks	0	100	102	104	106	108	110	
3.	Angka Konsumsi Ikan	positif	Kg/Kap/Thn	46.6 35,18	46.8 36,67	47 36,77	47.5 36,86	48 36,97	48.5 37,06	49 37,14	
4.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	positif	Ton	292.44	340.15	350.36	360.87	371.69	382.85	394.34	
5.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	positif	Ton	1280.27	1280	1290	1300	1310	1320	1330	

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

**Tabel 4.8 Rumus Indikator Kinerja Kunci Dinas Perikanan Kota Dumai**

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Rumus
1	Perikanan	1	1 Nilai Tukar Nelayan	$\text{Nilai Tukar Nelayan} = \frac{\text{Total Penerimaan Nelayan}}{\text{Total Pengeluaran Nelayan}} \times 100$
			2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	$\text{Nilai Tukar Pembudidaya Ikan} = \frac{\text{Total Penerimaan Pembudidaya Ikan}}{\text{Total Pengeluaran Pembudidaya Ikan}} \times 100$
			3 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	$\text{Produksi perikanan tangkap} = \sum \text{Hasil tangkapan Ikan di Laut}$
			4 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	$\text{Produksi perikanan budidaya} = \sum \text{Hasil budidaya ikan}$
			5 Konsumsi Ikan Masyarakat	$KIM = \sum_{i=1}^n \frac{KIDRT \times WEIND}{JP}$

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

## **BAB V PENUTUP**

Rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai periode 2025-20269 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana strategis ini ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, dan komitmen seluruh pimpinan dan staf Dinas Perikanan Kota Dumai. Rencana strategis ini disusun sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana strategis Kota Dumai Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kota Dumai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Selain itu, rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Dumai. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan strategis ini diucapkan terima kasih, sehingga tujuan Dinas Perikanan Kota Dumai dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai terpilih dapat terwujud.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

# Cascading Dinas Perikanan Pemerintah Kota Dumai 2025-2029

**Visi : "Kota Industri yang Unggul, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029"**

## MISI III : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG PRODUKTIF

